

RINGKASAN

Rumah makan merupakan salah satu usaha gastronomi praktis yang memiliki konsumen yang sangat luas dan beragam. Keterkaitan akan pertumbuhan masyarakat Indonesia dan kehadiran rumah makan berbanding secara lurus atau linier sebagai bentuk dalam upaya pemenuhan permintaan akan pangan siap saji yang praktis, namun perlu diperhatikan bahwa masyarakat di Indonesia mayoritas beragama muslim. Salah satu persoalan yang diatur oleh syariat Islam adalah halal dan haram, dimana dua hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan oleh kaum muslimin dalam hidupnya termasuk dalam produksi pangan atau pangan halal. Jaminan akan kehalalan suatu produk yang diperjual belikan di Indonesia dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal, namun ditemukan bahwa dari 116 rumah makan yang ada di Kabupaten Banyumas mayoritas rumah makan yang telah memiliki sertifikasi halal merupakan rumah makan yang berskala menengah sampai besar hal ini disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan baik segi internal dan eksternal yang menyebabkan proses pengajuan sertifikasi halal jalur reguler sulit untuk diterapkan. Sampai saat ini belum ada penelitian mengenai panduan atau kerangka kerja yang dapat memberikan kemudahan untuk penyelesaian hambatan-hambatan yang ada dalam pengajuan sertifikasi halal jalur reguler. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal pada implementasi sertifikasi halal, melakukan pengembangan *roadmap* yang dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan penyelesaian hambatan dari segi internal dan eksternal dan melakukan pengembangan model dalam meninjau tindakan yang perlu dilakukan dalam penyelesaian hambatan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas menggunakan studi kualitatif dengan pengambilan data melalui tiga kali rangkaian kegiatan *Focus Group Discussion*. Sumber data berasal dari *key informant* yakni lembaga pemerintahan daerah, komunitas badan sertifikasi, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan pelaku usaha. Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi dari hulu ke hilir dalam proses sertifikasi halal jalur reguler dan pemetaan potensi yang dapat diterapkan pada kelompok sasaran dimana dalam hal ini adalah pelaku usaha dari rumah makan yang dikenakan kewajiban sertifikasi halal rumah makan. Dalam upaya mempermudah proses sertifikasi halal yang selanjutnya dikembangkan menjadi model pengembangan dan *roadmap* implementasi sertifikasi halal dengan model adopsi Kapurubandara (2009). Analisis data dilakukan menggunakan tiga tahapan pengkodean antara lain *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hambatan internal dan eksternal dalam pengajuan sertifikasi halal pada jalur reguler. Hambatan internal secara umum mencakup komitmen dan pemenuhan jaminan produk halal serta sumber daya manusia dan hambatan eksternal secara umum mencakup hambatan ketersediaan bahan baku yang sulit, mengenai regulasi, sosialisasi dan sumber daya manusia segi eksternal. Terdapat beberapa kategori solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masing-masing hambatan yang ada diantaranya adalah solusi edukasi dan pelatihan, sosialisasi, digitalisasi informasi, digitalisasi administrasi,

peningkatan layanan publik, penguatan regulasi, pemberian *benefit*, sinergi dan kolaborasi antar *stakeholders* dan penyediaan daging berlabel halal. *Roadmap* yang dihasilkan menunjukkan terdapat dua tahapan yang harus dilalui secara internal yang pertama hambatan mengenai komitmen dan pemenuhan pelaksanaan jaminan produk halal dilanjutkan dengan penanganan hambatan sumber daya manusia segi internal, sedangkan untuk segi eksternal terdapat empat tahapan hambatan yang harus dilalui dan ditangani yakni ketersediaan bahan baku, regulasi, sosialisasi dan yang terakhir adalah sumber daya manusia segi eksternal, *roadmap* yang telah ditemukan kemudian dibuat ilustrasi praktis dengan model yang memudahkan pemahaman mengenai tindakan secara umum yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak internal dan eksternal, Ditemukan bahwasanya terdapat beberapa tindakan yang sudah dilakukan saat ini, namun masih menitikberatkan untuk akselerasi sertifikasi jalur *self declare* sehingga beberapa solusi yang disajikan memiliki penekanan fokus untuk pengajuan jalur reguler.



SUMMARY

Restaurant is one of the practical gastronomy businesses that has a very wide and diverse consumer. The relationship between the growth of Indonesian society and the presence of restaurants is directly or linearly proportional as a form of efforts to fulfill the demand for practical ready-to-eat food, but it should be noted that the majority of people in Indonesia are Muslims. One of the issues regulated by Islamic law is halal and haram, which are two things that cannot be separated by Muslims in their lives, including in food production or halal food. The guarantee of the halalness of a product traded in Indonesia is proven by the existence of halal certification, but it was found that of the 116 restaurants in Banyumas Regency, the majority of restaurants that already have halal certification are medium to large-scale restaurants. This is due to the existence of obstacles both internally and externally that make the process of applying for regular halal certification difficult to implement. Until now, there has been no research on guidelines or frameworks that can provide convenience for resolving existing obstacles to applying for regular line halal certification. So this study aims to identify internal and external obstacles to the implementation of halal certification, develop a roadmap that can be used as a guide and reference for resolving obstacles from an internal and external perspective and develop a model in reviewing the actions that need to be taken in resolving obstacles.

The research was conducted in Banyumas Regency using a qualitative study with data collection through three Focus Group Discussion activities. Data sources come from key informants, namely local government agencies, the certification body community, the Halal Product Process Assistance Agency (LP3H) and business actors. The observation variables in this study are the problems that occur from upstream to downstream in the regular path halal certification process and mapping the potential that can be applied to the target group, which in this case are all parties involved in the process flow of applying for halal certification in an effort to simplify the halal certification process which is then developed into a development model and roadmap for implementing halal certification with the Kapurubandara adoption model (2009). Data analysis was carried out using three coding stages including open coding, axial coding and selective coding.

The results showed that there are internal and external obstacles to applying for halal certification through the regular route. Internal barriers in general include commitment and fulfillment of halal product assurance and human resources and external barriers in general include obstacles to the availability of difficult raw materials, regarding regulations, socialization and external human resources. There are several categories of solutions that can be done to solve each of the existing obstacles including education and training solutions, socialization, information digitization, administrative digitization, improving publik services, strengthening regulations, providing benefits, synergy and collaboration between stakeholders and providing halal certified meat. The resulting roadmap shows that there are two stages that must be passed internally, the first is obstacles regarding commitment and fulfillment of halal product assurance implementation followed by

handling internal human resource obstacles, while for the external side there are four stages of obstacles that must be passed and handled, namely the availability of raw materials, regulations, socialization and the last is external human resources, The roadmap that has been found is then made into a practical illustration with a model that facilitates understanding of the general actions that must be taken by both internal and external parties, It was found that there are several actions that have been taken at this time, but they still emphasize the acceleration of self-declare path certification so that the several solutions that are presented have a focus on regular path submissions.

